

# **RINGKASAN LAPORAN LKJIP TAHUN 2022**

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai wujud dari pelaksanaan penguatan area akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus berupaya meningkatkan integritas, performa aparat pengadilan dan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan. Berbagai program telah dilaksanakan untuk mendorong terjadinya perubahan yang signifikan salah satunya adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas pada seluruh pengadilan dan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda kelas 1A salah satunya yang menerapkan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sebagai wujud penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya SAKIP tersebut secara operasionalnya diatur oleh Surat Edaran Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara revidi atas laporan

kinerja instansi Pemerintah yang diperintah untuk membuat SAKIP tersebut oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No. W18-U/4124/OT.01.1/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 melalui Surat SEKMA No.2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal penyampaian Dokumen SAKIP dan Dokumen Perjanjian Kinerja, maka Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A yang merupakan salah satu Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI akan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) tahun 2022 dan

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 - 2024.

Laporan Kinerja Pemerintah ini dibuat sebagai wujud tanggungjawab kami satuan kerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A sekaligus juga sebagai suatu instrument ukur dalam mengukur kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kegiatan-kegiatan dan sasaran.

Laporan Kinerja Pemerintah (LkjIP) satuan kerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A tahun 2022, selain berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja kegiatan, sasaran dan target yang dicapai, LkjIP juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pengambil dan pembuat keputusan dalam menilai, mengukur kinerja yang telah ditetapkan dan juga memberikan data untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa-masa mendatang.

Bercermin dari keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A, sebenarnya tidak terlepas pula dari berbagai kendala yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menanggapi kondisi yang bersifat kendala ini, maka diadakan evaluasi secara berkala atas kendala tersebut dengan mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala tersebut agar tidak terjadi ditahun-tahun berikutnya.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

<b>SASARAN STRATEGIS I</b>			
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>			
<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
Perdata			
HI	75%	85,68%	114,24%
Tipikor	75%	77,55%	103,4%
Pidana	75%	86,40%	115,20%
	75%	85,71%	114,29%
<b>Jumlah</b>		<b>92,90%</b>	<b>123,87%</b>
b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif	2%	0%	0%
<b>Jumlah</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	75%	96,23%	128,30%
<b>Jumlah</b>	-	<b>96,23%</b>	<b>128,30%</b>
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	75%	96,17%	128,23%
<b>Jumlah</b>	-	<b>96,17%</b>	<b>128,23%</b>
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%	100%	100%

f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan	90%	99,57%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I</b>			<b>128,72%</b>

<b>SASARAN STRATEGIS II</b>			
Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	8,97%	59,83%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II</b>			<b>105,40 %</b>

<b>SASARAN STRATEGIS III</b>			
Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5%	0	0
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbankum)	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III</b>			<b>100%</b>
<b>SASARAN STRATEGIS IV</b>			
<b>Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>			
<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti( Eksekusi )	25%	47,74%	162,96%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV</b>			<b>162,96%</b>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Seluruhnya</b>			<b>129,99%</b>

Sangat disadari, capaian kinerja di tahun 2022 masih belum sesuai harapan, namun sebagai gerbang terakhir penegakan hukum, Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A akan tetap konsisten untuk melakukan sebagai upaya agar setiap produk yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A antara lain adalah :

- a. Peningkatan Optimalisasi Penggunaan Teknik Informasi (TI)
- b. Penguatan fungsi pengawasan internal
- c. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan prima kepada public

➤ **MONITORING dan EVALUASI KINERJA**

- **Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.**

Pencapaian penyelesaian perkara mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, Jumlah perkara masuk tahun 2021 sebanyak 297 perkara dan penyelesaian sisa perkara pada tahun 2021 sebanyak 265 Perkara, sedangkan tahun 2022 ini jumlah perkara masuk sebanyak 3.449 perkara. Semua perkara tahun 2022 telah putus walaupun ada 4 perkara perdata belum putus akan tetapi sudah mencapai target sesuai indikator yang disencanakan. Berbagai upaya dilakukan Pimpinan serta semua ASN kepaniteraan walaupun jumlah SDM Hakim maupun Panitera Pengganti yang cenderung mengalami pengurangan terutama Hakim mutasi promosi jabatan sedangkan Panitera pengganti ada yang pensiun juga mutasi promosi jabatan. Selain itu disebabkan yang terjadi adalah jumlah sisa perkara tahun lalu dan penyelesaian perkara dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengatasi bertambahnya penyelesaian perkara ini diperlukan langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk menghadapi akhir tahun dalam rangka meminimalisir banyaknya sisa perkara tersebut. Untuk upaya hukum, capaian kinerja tetap mengalami kenaikan dan *masih diatas seratus persen sehingga target masih tercapai.*

- **Sasaran II: Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.**

1. Penyampaian isi putusan kepada para pihak secara tepat waktu ada perubahan secara prosentasi dibanding tahun 2021 sesuai rencana indikator kinerja 75%. Sedangkan untuk tahun 2022 ada kenaikan 128,29% bahwa Jurusita dapat menyelesaikan melalui Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan maupun kepada RT setempat walaupun ada beberapa para pihak alamatnya yang tidak diketahui, ada juga yang alamatnya tidak sesuai dengan KTP, selain itu ada pula posisinya yang ada diluar kota dan banyak lagi hal-hal lain yang meyebabkan tidak maksimalnya proses penyampaian isi putusan kepada para pihak yang dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Mediasi pada tahun 2021 68 perkara (Proses gagal 14 perkara) sedangkan tahun 2022 Mediasi Masuk sebanyak 137 perkara (proses gagal 97 perkara akte damai 7 perkara, tidak diproses mediasi 23 perkara dan mediasi berjalan 51

perkara), kenaikan terjadi pada penyelesaian proses perkara mediasi tahun 2021 penyelesaian perkara mediasi damai adalah 0% dari 15% pada perbandingan tahun 2021 capaian sebesar 21,8% sedangkan tahun 2022 pencapaian 59,83% dari 15% sesuai rencana target yang dicapai. Kenaikan pencapaian penyelesaian perkara melalui mediasi ini tak lepas dari jenis dan kerumitan perkara yang masuk. Dan hal inilah yang membuat target mediasi masih belum efektifnya proses mediasi sebagai cara penyelesaian yang cepat sederhana dan murah.

- **Sasaran III: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.**

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A tahun 2022 ada melaksanakan sidang di luar gedung yaitu 13 perkara (miras, pedagang kaki lima dan penganiayaan ringan), tahun lalu 2021 terdapat 11 perkara (pelanggaran tidak memakai masker pada saat pandemi Covid 19). Untuk indikator pelayanan posbakum ada 65 perkara ditahun 2022 dengan anggaran Rp43.200.000,- dapat direalisasikan sebesar 99,67% dengan target 100% ditahun 2022, ini menunjukkan sistem kerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A telah berjalan dengan baik dalam hal layanan bantuan hukum.

Oleh karena itu pencapaian dapat terukur melalui prodeo, posbakum dan sidang di luar pengadilan berada di atas target. Jika dilihat data statistiknya maka terjadi kenaikan jumlah pengunjung di layanan posbakum jika dibandingkan dengan tahun 2021, sidang di luar pengadilan ada sebanyak 13 perkara karena adanya musibah penyebaran covid-19 sehingga ada penertiban pemakaian masker dan sidang dilakukan di Satpol PP, Kelurahan dan Kantor Camat oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

- **Sasaran IV: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.**

Pada tahun 2021 jumlah eksekusi putusan sebanyak 69 perkara diselesaikan sebanyak 14 perkara sisa 54 perkara dengan capaian 137,25% dari capaian 15%

sedangkan tahun 2022 putusan eksekusi masuk sebanyak 60 putusan perkara selesai 25 perkara cabut 0 sisa 35, atas permohonan eksekusi putusan Pengadilan tersebut masih dalam proses tindak lanjut, pencapaian target 162,96% dari capaian 15% di tahun 2022. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik bila dibandingkan dengan tahun 2021.

### Perbandingan dengan target Menengah Renstra 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Target (%)	Realisasi akhir 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan pengadilan	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	90 %	137,20 %	110,55 %	114,82 %
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan IT	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	90%	97,93 %	105,40%	127,62 %
Terwujudnya dukungan tugas pengadilan negeri	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	100%	100 %	100%	100 %



Samarinda Kelas 1A	miskin dan terpinggirkan.				
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	90%	33,03 %	63,77%	166,68 %

Tabel tersebut diatas membandingkan antara rata-rata realisasi capaian sasaran selama tahun 2022 dengan target jangka menengah. Target ini adalah target untuk mengukur pencapaian sasaran terhadap tujuan yang ditetapkan :

1. Berdasarkan tabel diatas, untuk proses peradilan pengelolaan perkara dan efektivitas pengelolaan administrasi perkara terjadi kenaikan 114,82% pada tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 97,68 %.
2. Untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian akses dan tindaklanjut permohonan eksekusi ada peningkatan proses pelaksanaan eksekusi yang ditindaklanjuti.

Kendala yang dihadapi adalah untuk sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel terutama untuk indikator sisa perkara. Masih terdapat sisa perkara pada setiap tahun sehingga mengalami beban jumlah penyelesaian perkara sehingga capaian tidak sesuai yang diharapkan. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang tepat berkaitan dengan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun dengan koordinasi baik secara internal maupun eksternal misalnya kejaksaan dan stakeholder yang lain.

Kemudian untuk meningkatkan kepatuhan pengadilan khususnya tindak lanjut terhadap perkara permohonan eksekusi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap memang memerlukan strategi yang baik untuk menyelesaikan semua

perkara eksekusi dengan mengadakan komunikasi internal dengan pada pihak yang berperkara secara data statistik mengalami ada kenaikan pencapaiannya.

## ➤ KESIMPULAN

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Salah satu karakteristik penting dalam konsep Good Governance adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandate tersebut. Secara umum organisasi atau instansi harus akuntabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

Salah satu konsep penting dalam upaya akuntabilitas adalah Manajemen Kinerja. Manajemen Kinerja adalah suatu pola pemikiran untuk mengkombinasikan dan menggunakan berbagai fungsi manajemen dengan system administrative dan struktur organisasi. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran kinerja.

Aplikasi Manajemen Kinerja yang dalam hal ini adalah Pengukuran Kinerja dalam lingkungan institusi pemerintahan dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIIP ).

Dilingkungan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A , LKJIIP tahun 2022 ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A selama tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh Organisasi. Walaupun Inpres Nomor 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKJIIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan perbandingan antara sasaran-sasaran yang ditargetkan diperbandingkan dengan hasil kerja/realisasi yang diukur pada akhir tahun 2022.

Beberapa hal positif atau keberhasilan yang dicapai tahun 2022 :

- Dipertahankannya performa penyelesaian perkara
- Meningkatnya kinerja pegawai
- Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat berupa informasi hukum dengan adanya meja informasi Pelayanan Hukum/ Pos Bantuan Hukum.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengadilan baik melalui website yang terintegritas dengan jadwal persidangan yang selalu terbaru maupun melalui pos pelayanan hukum berupa informasi beracara di pengadilan.

Kendala hambatan yang dihadapi tahun 2022 :

- Dalam penyelesaian perkara terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara.
- Jumlah perkara yang naik secara signifikan pada tahun 2022 namun jumlah SDM Hakim maupun Panitera Pengganti yang tidak bertambah bahkan cenderung berkurang.
- Kurangnya pegawai yang berkopetensi atau kurangnya kompetensi pegawai, yang akan mempengaruhi kualitas hasil kerja.
- Kurangnya anggaran APBN DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yaitu :
  - a. Anggaran Pemeliharaan Gedung yang kurang dimana terdapat 2(dua) yaitu gedung PN.Samarinda dan Gedung Tipikor,
  - b. Sarpas pada Pengadilan Negeri Samarinda sudah tua dan usang perlu adanya peremajaan dengan yang baru seperti sarana elektronik PC pada bagian Panitera Pengganti dan laptop pada Panmud Kepaniteraan dan Kasub Bagian Kesekretarian serta printer.

- c. Jaringan listrik yang sering terganggu perlu perbaikan total Instalasi jaringan listrik dimana sangat besar pengaruh kepada keadaan semua sarana elektronik yang dapat mengalami kerusakan.
- d. Kurangnya anggaran APBN DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk penyelesaian perkara terutama pada penyelesaian perkara Hubungan Industrial (HI) yang tingginya masuk jumlah perkara pada tahun 2022 sebanyak 65 perkara yang tiap tahun tidak ada peningkatan anggaran sedangkan data dukung keadaan perkara sudah dilampirkan untuk menguatkan usulan rencana kertas kerja.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kuantitas serta kualitas SDM, sarana prasarana , dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A dapat meningkat.

Dengan demikian secara umum tujuan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.